



## Penerapan Kebijakan Pencegahan Korupsi dalam Lembaga

Jordan Ang Saputra

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung,  
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: [Jordan1357as@gmail.com](mailto:Jordan1357as@gmail.com)

**Abstract.** Corruption is one of the biggest challenges for many companies in various industries. Implementing an anti-corruption policy is an important step in maintaining integrity, reputation and continuity of the institution. This article explains how companies can design and implement effective anti-corruption policies. Key elements of this policy include employee training, internal audits, transparency of business processes, and the application of strict sanctions for violations. Furthermore, a culture of integrity in the work environment must be built through good examples from top management. Technology can also facilitate monitoring and oversight and reduce the risk of corruption. With strict guidelines and the support of all stakeholders within the company, anti-corruption efforts can be implemented more effectively and help companies achieve sustainable growth.

**Keywords:** Corruption prevention, integrity, transparency, anti-corruption technology.

**Abstrak.** Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar bagi banyak perusahaan di berbagai industri. Penerapan kebijakan antikorupsi merupakan langkah penting dalam menjaga integritas, reputasi, dan kelangsungan lembaga. Artikel ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat merancang dan menerapkan kebijakan antikorupsi yang efektif. Elemen kunci dari kebijakan ini mencakup pelatihan karyawan, audit internal, transparansi proses bisnis, dan penerapan sanksi tegas atas pelanggaran. Selanjutnya, budaya integritas di lingkungan kerja harus dibangun melalui keteladanan yang baik dari manajemen puncak. Teknologi juga dapat memudahkan pemantauan dan pemantauan serta mengurangi risiko korupsi. Dengan pedoman yang ketat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di dalam perusahaan, upaya antikorupsi dapat diterapkan secara lebih efektif dan membantu perusahaan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pencegahan korupsi, integritas, transparansi, teknologi anti-korupsi.

### 1. PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan pencegahan korupsi dalam lembaga memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Dalam lingkungan yang terus berkembang dan penuh tantangan, institusi dituntut untuk memiliki sistem pemantauan yang ketat dan transparansi dalam seluruh proses. Kebijakan antikorupsi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi praktik korupsi yang dapat merugikan berbagai pihak. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan swasta. Situasi ini menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan, sehingga pemberantasan korupsi di berbagai tingkatan menjadi prioritas utama. Suatu lembaga memerlukan sistem yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas korupsi. Strategi anti-korupsi yang efektif biasanya mencakup pengambilan keputusan yang transparan, pemantauan internal yang ketat, dan pelatihan anti-korupsi untuk seluruh karyawan. Salah satu penyebab tingginya tingkat korupsi dalam lembaga adalah

lemahnya sistem manajemen dan pengawasan. Kurangnya transparansi seringkali memberikan celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Di sisi lain, budaya kerja yang tidak menjunjung tinggi etika profesi dan rendahnya integritas menimbulkan tantangan dalam pencegahan korupsi.

Rencana strategis menggambarkan se-suatu yang ingin dicapai dalam suatu kerangka waktu tertentu. Sesuatu yang ingin dicapai itu sudah tentu berhubungan dengan maksud dari didirikannya organisasi atau dengan kata lain rencana strategis berkaitan erat dengan alasan keberadaan organisasi. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pengawasan internal, dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, pelatihan antikorupsi bagi seluruh karyawan dapat meningkatkan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi korupsi sekaligus mendorong perilaku etis dalam melaksanakan tugasnya. Institusi pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bebas korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui penerapan kebijakan yang tepat. Penerapan upaya antikorupsi bukan hanya sekedar kewajiban regulasi, namun juga bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Sinergi kebijakan yang baik, upaya lembaga dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meminimalkan korupsi, memungkinkan lembaga berfungsi secara efektif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penerapan kebijakan pencegahan korupsi yang efektif dalam lembaga?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa perusahaan yang telah menerapkan kebijakan antikorupsi. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk manajemen, karyawan, dan evaluator eksternal, serta kajian terhadap dokumen kebijakan perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan antikorupsi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi operasional dan mengurangi risiko pelanggaran etika. Namun, penelitian juga mengidentifikasi tantangan implementasi, termasuk kurangnya keterlibatan manajemen, budaya organisasi yang permisif, dan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di bidang ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan kebijakan pencegahan korupsi dalam lembaga merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ketika diterapkan, kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko korupsi dan penipuan yang dapat merugikan institusi, baik dari sudut pandang reputasi maupun keuangan. Korupsi merupakan masalah yang kompleks dan merugikan yang dapat meresap ke dalam berbagai lapisan masyarakat dan organisasi, mulai dari sektor publik hingga swasta. Adapun, korupsi juga memiliki stuktural, secara personal, (individu) dan, komunitas (kelompok.). Hal ini, sulit untuk, diberantas ketika, tindakan yang, dilakukan secara, komunitas. Karena, tentunya ada, permainan dalam, ranah stuktural, kebijakan hukum, yang, ada. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, analisis kegagalan harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Proses analisis korupsi dimulai dengan mendefinisikan apa arti korupsi dalam konteks tertentu. Definisi ini mencakup berbagai bentuk korupsi yang dapat terjadi di berbagai lingkungan dan lokasi, seperti penyuapan, nepotisme, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sangat penting untuk memetakan dan mengidentifikasi zona-zona rawan korupsi. Fokusnya sering kali pada bidang-bidang seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengelolaan keuangan. Dengan mengidentifikasi area ini, dapat dipahami di mana dan mengapa korupsi terjadi serta memperhatikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Proses ini harus diikuti dengan analisis penyebab korupsi. Faktor-faktor ini sering kali mencakup kelemahan dalam sistem pemerintahan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, budaya organisasi yang buruk, dan tidak memadainya insentif bagi individu dan kelompok yang terlibat.

Korupsi, berkorelasi dengan, masalah penyalahgunaan, kesempatan atau, keleluasaan untuk, memperkaya, diri, serta besar, kecilnya kekuasaan, yang disalahgunakan, untuk memperkaya, diri itu, yang akhirnya, akan membawa, implikasi bahaya, yang ditimbulkannya. Lebih besar, kekuasaan yang, disalahgunakan akan, lebih besar, pula, bahayanya. Di tingkat masyarakat, korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga serta meningkatkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menilai dampak korupsi ini untuk urgensi tindakan. Untuk memahami tingkat korupsi secara lebih obyektif, pengukuran dan penggunaan indikator yang tepat sangatlah penting. Dengan data yang ada, kita dapat mengambil tindakan yang lebih tepat sasaran untuk memberantas korupsi yang merugikan. Mengembangkan strategi antikorupsi yang efektif sering kali mencakup peningkatan transparansi dalam proses pemerintahan, penguatan sistem pemantauan, dan pelatihan etika bagi karyawan dan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah awal

yang penting menuju pembangunan masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab. Dengan memahami akar masalah dan dampaknya, kita dapat mengembangkan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan integritas di seluruh sektor. Upaya ini tidak hanya memberikan manfaat bagi lembaga dan institusi, namun juga berkontribusi terhadap kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua macam yaitu: 1. Penindakan dan 2. Pencegahan, kedua hal ini akan sulit di jalankan apabila pemerintah tidak bekerjasama dengan baik bersama masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang merajalela di Indonesia saat ini. Hal ini sangat memperhatikan karena memberikan dampak buruk dan luar biasa terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Namun jika dilihat dari upaya-upaya pemberantasan tersebut akan lebih baik jika korupsi dilakukan dengan cara pencegahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Mengembangkan kebijakan antikorupsi merupakan proses penting untuk menciptakan lingkungan lembaga yang bersih, transparan, dan akuntabel. Proses ini dimulai dengan analisis rinci mengenai risiko dan korupsi yang mungkin terjadi dalam lembaga. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi bidang-bidang yang rentan terhadap korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, dan interaksi dengan masyarakat. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada tahap ini, termasuk manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah mengumpulkan informasi yang relevan, lembaga tersebut harus mengembangkan kebijakan yang jelas dan rinci. Kebijakan harus mencakup definisi yang tepat mengenai perilaku korupsi, prosedur pelaporan yang aman dan mudah diakses, serta uraian konsekuensi bagi mereka yang melanggar kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini dicatat dalam dokumen resmi yang mudah dipahami oleh seluruh karyawan. Selain itu, sosialisasi kebijakan penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota lembaga memahami dan menanamkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kebijakan. Oleh karena itu, program pelatihan rutin dan interaktif harus dilakukan untuk membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari praktik korupsi. Dengan kebijakan yang jelas dan pemahaman yang kuat di kalangan pegawai, institusi dapat membangun budaya organisasi yang mendukung integritas dan transparansi. Hal ini bukan hanya tentang mencegah praktik korupsi, namun juga tentang menciptakan lingkungan di mana semua individu merasa bertanggung jawab untuk melaporkan dugaan kasus korupsi. Mengembangkan kebijakan secara sistematis yang menggabungkan seluruh elemen, lembaga tersebut dapat memperkuat upaya antikorupsi mereka dan menjadikannya sebagai nilai inti dalam operasi mereka sehari-hari. Akhirnya, komitmen terhadap pencegahan korupsi akan membantu lembaga untuk meningkatkan reputasinya dan

membangun kepercayaan dengan masyarakat, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan sosial dan ekonomi.

### **Komitmen Manajemen dan Budaya Integritas Pencegahan Korupsi Dalam Lembaga**

Komitmen manajemen merupakan elemen kunci dalam membangun dan mempertahankan budaya integritas dalam suatu lembaga. Ketika manajemen puncak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas, mereka tidak hanya menetapkan standar perilaku yang tinggi namun juga memberikan contoh yang jelas bagi seluruh karyawan. Manajemen harus konsisten menerapkan kebijakan antikorupsi dan memastikan bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua orang, tanpa kecuali. Komitmen ini harus ditunjukkan melalui langkah-langkah konkrit seperti memantau secara langsung penerapan kebijakan antikorupsi, menyediakan sumber daya yang memadai untuk pelatihan integritas, dan menerapkan sanksi tegas bila terjadi pelanggaran. Budaya integritas terjadi ketika seluruh lembaga, dari atas hingga bawah, memahami bahwa integritas bukan sekedar sifat, namun merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek pekerjaan.

Manajemen yang kuat dalam membangun budaya integritas adalah pondasi utama bagi keberhasilan penerapan kebijakan etika dan anti-korupsi di dalam lembaga. Manajemen harus berperan aktif dalam memimpin dengan memberi contoh melalui perilaku yang transparan dan jujur, menunjukkan bahwa integritas adalah nilai inti yang tak bisa ditawar. Sistem integritas mesti dimulai dari dalam rumah tangga sampai kemudian berkembang ke tengah-tengah masyarakat. Intinya, integritas mesti dibawa dari rumah ke lingkungan kerja atau tempat lainnya sebab dapat mempengaruhi lingkungan sosial seseorang. Hal ini dapat diwujudkan dengan berkomunikasi secara jelas tentang pentingnya integritas kepada seluruh karyawan, membangun mekanisme pengawasan yang kuat, serta menindak tegas pelanggaran tanpa diskriminasi, terlepas dari jabatan pelaku. Selain itu, manajemen perlu memastikan bahwa kebijakan integritas didukung dengan sumber daya yang memadai, seperti pelatihan berkala, tim pengawas inner, dan sistem pelaporan yang aman dan rahasia. Komitmen ini harus tercermin dalam kebijakan dan praktik sehari-hari, mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga tata kelola operasional. Hal ini menciptakan rasa percaya dan tanggung jawab di kalangan karyawan, yang lebih termotivasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam bekerja. Ketika komitmen kepemimpinan konsisten dan tercermin dalam tindakan nyata, budaya integritas secara alami berkembang di semua lembaga. Karyawan memastikan bahwa nilai integritas dihormati, dipatuhi, dan dilindungi. Hal ini juga mempengaruhi hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan dan pemangku kepentingan

lainnya, dimana transparansi dan akuntabilitas meningkatkan kepercayaan. Pada akhirnya, komitmen tim kepemimpinan terhadap budaya integritas tidak hanya akan mencegah korupsi, namun juga meningkatkan reputasi lembaga secara keseluruhan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

### **Teknologi Dalam Kebijakan Pencegahan Korupsi Dalam Lembaga**

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan penerapan teknologi tersebut, atau dengan kata lain tindak pidana korupsi dapat dicegah secara elektronik. Aplikasi E-Gov dipercaya sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Bukan bermaksud menggantikan sistem pemerintahan, justru memperkuat sistem pemerintahan dengan berbasis teknologi komunikasi. Secara umum, E-Government dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online, sehingga melalui sistem e-government, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah (N 2018). Teknologi antikorupsi memberikan solusi canggih untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan mengurangi peluang penyalahgunaan. Salah satu penerapan teknologi ini yang paling berdampak adalah sistem Endeavour Asset Arranging (ERP), yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu fase yang terkomputerisasi. Melalui ERP, semua transaksi keuangan, pengadaan, dan pengelolaan sumber daya dapat dilacak dan diaudit secara real time, sehingga mengurangi risiko manipulasi data dan penipuan. Teknologi ini tidak hanya membantu pencatatan secara akurat, namun juga memudahkan manajer dan pengawas untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan anomali yang mungkin merupakan tanda-tanda korupsi.

Dalam sistem blockchain, semua transaksi dapat dilacak dan diverifikasi karena semua transaksi dicatat pada blockchain terenkripsi dan tidak dapat diubah tanpa meninggalkan jejak. Hal ini khususnya efektif dalam proses pengadaan dimana transparansi dari awal hingga akhir sangat penting untuk mencegah penyuapan dan penipuan. Teknologi Blockchain juga dapat digunakan untuk membuat kontrak pintar, kontrak pintar secara otomatis mengeksekusi kontrak ketika kondisi tertentu terpenuhi, menghindari intervensi manusia yang mungkin rentan terhadap manipulasi. Teknologi Blockchain digunakan sebagai alat yang efektif dalam pengembangan kinerja, karena penyimpanan sertifikat dalam sistem cloud. Intervensi oleh pihak ketiga manapun dengan mudah diblokir oleh kehadiran algoritma canggih dalam.

teknologi ini. Menurut Alharby, & van Moorsel, menyebutkan bahwa, rantai blok, umumnya berisi, tiga lapisan, abstrak yang, meliputi jaringan, insentif dan, lapisan, konvensi. Ini tiga, hal penting, yang memberikan, keuntungan dalam, menjaga keamanan, transparansi untuk, membuat prosesnya, lebih, cepat. Kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin juga semakin banyak digunakan untuk mencegah korupsi. Sistem dapat memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, mendeteksi pola mencurigakan, dan mengingatkan administrator dan auditor terhadap potensi penipuan. Teknologi bisa mendeteksi aktivitas bisnis yang tidak biasa, seperti peningkatan pengeluaran secara tiba-tiba di departemen tertentu atau pola berulang dalam pemberian kontrak kepada pihak tertentu, yang dapat menunjukkan adanya konflik kepentingan atau penyuapan. Teknologi sistem pelaporan anonim, seperti aplikasi dan platform online, memudahkan karyawan dan masyarakat Untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa takut akan dampak negatifnya, sistem ini melindungi identitas pelapor dan memungkinkan laporan diproses dengan cepat dan rahasia, sehingga meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap upaya antikorupsi lembaga. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi untuk mencegah korupsi tidak hanya menghasilkan kontrol dan pemantauan yang lebih ketat, namun juga respons yang lebih cepat terhadap ancaman korupsi. Perusahaan yang menggunakan teknologi ini secara efektif menciptakan lapisan keamanan tambahan yang mengurangi peluang individu untuk melakukan pelanggaran keamanan. Pada akhirnya, teknologi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan, efisien, dan beretika, sehingga memungkinkan lembaga mengendalikan risiko korupsi dengan lebih baik sekaligus menjaga integritas dan reputasinya.

### **Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pencegahan Korupsi Dalam Lembaga**

Menurut Nugroho (.2008: 471), Evaluasi, adalah penilaian, sejauh mana, keefektifan kebijakan, publik guna, dipertanggungjawabkan kepada, konstituen. Sejauh, mana tujuan, tercapai. Sedangkan, menurut Dye, dalam Parsons, (2001: 547.), evaluasi kebijakan, adalah pemeriksaan, yang, objektif, sistematis, dan, empiris terhadap, efek dari, kebijakan dan, program publik, terhadap targetnya, dari segi, tujuan yang, ingin, dicapai. Menilai efektivitas kebijakan antikorupsi merupakan langkah strategis yang membantu lembaga menilai sejauh mana kebijakan mereka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam, kerangka pembangunan, berkelanjutan, evaluasi, dampak korupsi, terhadap lingkungan, menjadi sorotan, utama penelitian, ini. Penyalahgunaan, kebijakan, perizinan, dan pengelolaan, sumber daya, alam dapat, membahayakan ekosistem, dan mengancam, ketahanan lingkungan. (Levidow, 2020.). Oleh karena, itu, pemahaman, mendalam tentang, keterkaitan antara, korupsi dan,

degradasi lingkungan. menjadi kunci. untuk merancang. strategi pembangunan. yang tidak. hanya efektif. secara ekonomi. dan sosial, tetapi juga. berkelanjutan dari. sudut pandang. lingkungan. Satu hal dapat digunakan adalah metode kualitatif, hal ini termasuk melakukan wawancara dengan staf, manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka terhadap kebijakan yang ada. Lalu dengan survei anonim bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi dari karyawan tentang tingkat kepercayaan mereka terhadap kebijakan antikorupsi serta efektivitas mereka dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan positif. Pengumpulan data yang dihasilkan memungkinkan lembaga untuk melakukan analisis kuantitatif berdasarkan indikator kinerja yang telah diidentifikasi sebelumnya. Saat melakukan penilaian, lembaga memperhatikan kondisi eksternal yang mungkin berdampak pada efektivitas kebijakan mereka, seperti perubahan peraturan, tren industri, dan perkembangan teknologi. Peraturan pengadaan yang baru dan ketat mengharuskan lembaga untuk menyesuaikan kebijakan antikorupsi mereka agar tetap patuh. Lalu dengan teknologi seperti analisis big data dapat digunakan dalam penilaian untuk mengidentifikasi pola perilaku mencurigakan dan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai potensi risiko korupsi. Setelah proses evaluasi selesai, maka harus dirangkum menjadi laporan yang jelas dan komprehensif yang mencakup rekomendasi, dan rencana tindakan perbaikan. Keputusan untuk menerapkan perubahan atau perbaikan kebijakan memerlukan dukungan dari manajemen senior agar implementasinya efektif. Selain itu, transparansi dalam mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada seluruh karyawan memperkuat kepercayaan dan komitmen karyawan terhadap upaya antikorupsi dalam lembaga. Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas upaya antikorupsi merupakan proses yang berkesinambungan, yang tujuannya tidak hanya untuk mengukur hasil, namun juga untuk menciptakan budaya organisasi yang proaktif memerangi korupsi. Dengan melakukan penilaian rutin dan menanggapi temuan yang ada, lembaga dapat memperkuat komitmen mereka terhadap integritas dan memastikan bahwa kebijakan antikorupsi yang ada sudah efektif.

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan kebijakan pencegahan korupsi dalam lembaga merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, beretika, dan berkelanjutan. Kebijakan antikorupsi yang efektif membantu seluruh karyawan dan pemangku kepentingan memahami pentingnya integritas dan mencegah perilaku yang merugikan perusahaan secara ekonomi dan etika. Tantangan yang terbesar dalam penerapan kebijakan antikorupsi adalah memastikan bahwa seluruh tingkatan lembaga, mulai dari manajemen

hingga staf eksekutif, memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya korupsi. Oleh karena itu, dalam menerapkan kebijakan ini harus memperhatikan berbagai aspek operasional perusahaan, seperti pelatihan karyawan, penegakan hukum internal, dan melakukan audit yang ketat. Lembaga yang berhasil mencegah korupsi biasanya memiliki audit internal yang ketat dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang efektif. Selain itu, transparansi proses bisnis dan keterbukaan terhadap audit eksternal menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pihak ketiga dan mitra bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fernanda, A., Yazid, M. F., & Silitonga, L. D. T. S. (2023). Korupsi dan pembangunan berkelanjutan: Evaluasi terhadap dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparat sipil negara (Studi putusan nomor: L32/Pid. LSusTpk/2021/PN. LTjk). *Sol Justici*.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.
- Nugroho, E. (2014). Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Rahmawati, D. E. (2017). Evaluasi integritas pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di PTSPL Kota Metro.
- Rasul, S. (2009). Penerapan good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Sitinjak, Y. K. (2023). Penataan kebijakan kepala desa dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Sunarya, P. A. (2022). Penerapan sertifikat pada sistem keamanan menggunakan teknologi blockchain. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*.
- Syauket, A., Lestari, S. P., & Simarmata, R. P. (2020). Inovasi birokrasi pemerintahan anti korupsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Melihat kebijakan e-procurement). *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*.